



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024;
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Perubahan Rencana Kerja dan
Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V : Penutup.

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. Dinas Pendidikan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- z. Kecamatan Klaten Utara;
- aa. Kecamatan Klaten Tengah;
- bb. Kecamatan Klaten Selatan;
- cc. Kecamatan Kalikotes;
- dd. Kecamatan Ngawen;
- ee. Kecamatan Kebonarum;
- ff. Kecamatan Wedi;
- gg. Kecamatan Jogonalan;
- hh. Kecamatan Gantiwarno;
- ii. Kecamatan Prambanan;
- jj. Kecamatan Manisrenggo;
- kk. Kecamatan Kemalang;
- ll. Kecamatan Karangnongko;
- mm. Kecamatan Jatinom;
- nn. Kecamatan Karanganyar;
- oo. Kecamatan Tulung;
- pp. Kecamatan Polanharjo;
- qq. Kecamatan Delanggu;
- rr. Kecamatan Juwiring;
- ss. Kecamatan Wonosari;
- tt. Kecamatan Ceper;
- uu. Kecamatan Pedan;
- vv. Kecamatan Karangdowo;
- ww. Kecamatan Cawas;
- xx. Kecamatan Trucuk; dan
- yy. Kecamatan Bayat.

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 30

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai TW II.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	9
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	12
IV. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	67
V. Penutup	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten. Dasar Penyusunan Rancangan Perubahan Renja 2025 ini dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan, Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan, Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang, Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024 disusun untuk memenuhi sub kegiatan, kegiatan, atau program yang belum dapat diakomodasi pada rencana kerja murni Tahun 2024. Penyusunan rancangan akhir perubahan renja juga disusun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan sampai dengan semester dua tahun berjalan, dari hasil evaluasi tersebut maka akan disusun target yang realistis dapat dicapai pada tahun 2024 serta dapat mengakomodir belanja yang masih kurang.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan yaitu : teknokratik, top down, bottom up partisipatif dan politis. Dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjarangan aspirasi

dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum musrenbang OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
28. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan

- Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
 32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

- Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
 51. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
 52. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
 53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 74 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten
 54. Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024 adalah dokumen Rencana Kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

3. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
5. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang
6. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Klaten tahun 2024.
7. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Awal Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2024)

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan TW II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dengan Triwulan ke 2 Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 2024.

Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, diantaranya:

- a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Nasional

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Bakesbangpol tidak ada.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya Pembatasan Kegiatan atau PPKM sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
- b. Adanya Mutasi sehingga anggaran gaji masih tersisa banyak

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Pada beberapa kegiatan, kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja program di Bakesbangpol Daerah Kabupaten Klaten.

- 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:
- a. Melakukan inovasi kegiatan yang tidak memerlukan tatap muka langsung
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak ada kelebihan pagu gaji dan tunjangan ASN

Secara terinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d TW II Tahun 2024
Bakesbangpol Kabupaten Klaten

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024		DPA 2024																				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	16.256.780.000	100	3.514.268.184	100	Rp3.800.469.218	100	4.799.642.280	95,00	407.956.314	95,00	1.637.454.407				95,00	2.045.410.721	95,00	42,6158993	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024				DPA 2024																		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	100	325.000.000	0	0	100	Rp30.000.000	100	30.000.000	100,00	2.630.000	100,00	0					50,00	2.630.000	50,00	8,76666667
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	325.000.000	0	0	4	Rp30.000.000	4	30.000.000	1,00	2.630.000	1,00	0					2	2.630.000	50,00	8,76666667
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen			2	2.700.000																

2	3	4	5		6		7				8								12=8+9+10+11		13=12/7*100	
											9				10							
							Renja 2024		DPA 2024		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	13.972.205.000	100	2.629.939.740	100	Rp3.164.476.179	100	3.163.649.241	100,00	330.146.597	100,00	1.171.023.117					100	1.501.169.714	100,00	47,45057368
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	13	13.368.205.000	17	2.543.006.316	13	Rp3.044.476.179	13	3.043.649.241	17,00	305.518.817	17,00	1.157.793.397					17	1.463.312.214	130,77	48,0775575
	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	orang			13	2.560.198.407																
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	604.000.000	1	86.933.424	1	Rp120.000.000	1	120.000.000	1,00	24.627.780	1,00	13.229.720					1	37.857.500	100,00	31,54791667

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024				DPA 2024																		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Bulan			12	61.260.288																
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	%	100	752.229.000	100	266.352.631	100	Rp247.000.000	100	247.000.000	100,00	42.776.000	100,00	19.347.765					100	62.123.765	100,00	25,15132186
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.000.000	6	2.934.000	4	Rp5.000.000	4	5.000.000	0,00	0	1,00	927.265					1	927.265	25,00	18,5453

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)			
							7		8		9		10		11		12=8+9+10+11						13=12/7*100	
							Renja 2024		DPA 2024															
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)					
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit			10		Rp3.999.290																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	59.528.000	28	26.406.151	2	Rp35.000.000	2	35.000.000	0,00	0	1,00	3.639.750					1	3.639.750	50,00	10,39928571		
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	unit			49	28.804.350																		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	65.000.000	24	12.932.800	2	Rp25.000.000	2	25.000.000	0,00	0	1,00	2.152.250					1	2.152.250	50,00	8,609		
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	Eksemplar			20000	16.500.000																		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				
											I		II		III		IV								
											8		9		10		11						12=8+9+10+11		13=12/7*100
				Renja 2024				DPA 2024																	
		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp (%)	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	22.466.000	48	1.500.000	12	Rp2.000.000	12	2.000.000	3,00	0	3,00	500.000					6	500.000	50,00	25			
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Eksemplar			950	750.000																			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	60.000.000	24	27.969.000	12	Rp40.000.000	12	40.000.000	3,00	11.025.000	3,00	2.465.000					6	13.490.000	50,00	33,725			
	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitas	kali			216	23.104.000																			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	533.235.000	54	125.452.330	12	Rp140.000.000	12	140.000.000	3,00	31.751.000	3,00	9.663.500					6	41.414.500	50,00	29,58178571			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
							2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
						Renja 2024		DPA 2024														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali			67	96.703.056																
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	449.381.000	100	141.030.613	100	Rp118.493.039	100	118.493.039	100,00	23.613.217	100,00	14.720.175					100	38.333.392	100,00	32,35075438
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	5.060.000	750	1.996.000	12	Rp2.221.800	12	2.221.800	0,00	0	6,00	0					6	0	50,00	0
	Jumlah Surat Terkirim	Eksemplar			580	1.108.000																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
						Renja 2024		DPA 2024														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	128600000	36	33.530.376	12	Rp42.271.239	12	42.271.239	3,00	8.836.549	3,00	6.444.526					6	15.281.075	50,00	36,15005228
	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan			12	22.884.448																
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000	0	0	1	Rp4.000.000	1	4.000.000	0,00	0	0,00	0					0	0	0,00	0
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit	12		0																	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	305.721.000	12	81.511.789	12	Rp70.000.000	12	70.000.000	3,00	14.776.668	3,00	8.275.649					6	23.052.317	50,00	32,93188143

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024		DPA 2024																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	orang			4	58.119.886																
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	757.965.000	100	476.945.200	100	Rp240.500.000	100	1.240.500.000	75,00	8.790.500	75,00	432.363.350					150	441.153.850	150,00	35,56258364
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	191.764.000	7	137.006.707	7	Rp148.000.000	7	148.000.000	2,00	8.790.500	1,00	36.575.000					3	45.365.500	42,86	30,65236486

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024		DPA 2024																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	unit			7	81.128.493																
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	16	9.000.000	4	4.280.000	5	Rp5.000.000	5	5.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	Jumlah Mebel terpelihara	Unit	16																			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	9.000.000	0	0	2	Rp2.500.000	2	2.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
						Renja 2024		DPA 2024														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit	16		0																	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	502.852.000	2	151.400.000	2	Rp50.000.000	2	1.050.000.000	0,00	0	1,00	395.788.350					1	395.788.350	50,00	37,69412857
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	unit			2	97.957.000																
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23	45.349.000	5	5.173.000	9	Rp35.000.000	9	35.000.000	0,00	0	4,00	0					4	0	44,44	0

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
						Renja 2024		DPA 2024														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpeliharaan	unit			2	10.520.000																
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	13	624.500.000	4,97	216.539.000	7	326.400.000	7	526.400.000	0,00	16.520.000	4,81	33.434.000					4,81	49.954.000	68,68	9,489741641

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)			
							7		8		9		10		11		12=8+9+10+11						13=12/7*100	
							Renja 2024		DPA 2024															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
			15		15,7			7		7		3,70		3,70						7,41		105,82		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dilaksanakan	%	100	624.500.000	100	216.539.000	100	Rp326.400.000	100	526.400.000	50,00	16.520.000	50,00	33.434.000						100	49.954.000	100,00	9,489741641	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				
											I		II		III		IV								
											8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100								
7		Renja 2024		DPA 2024		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp (%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100													
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	5	24.500.000	1	1.900.000	1	Rp5.000.000	1	5.000.000	0,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental tersusun	Dokumen	5																						

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
						Renja 2024		DPA 2024														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	750	600.000.000	200	139.815.100	500	Rp321.400.000	500	521.400.000	25,00	16.520.000	250,00	33.434.000					275	49.954.000	55,00	9,58074415
	Jumlah pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara	kali			1	74.823.900																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)			
							7		8		9		10		11		12=8+9+10+11						13=12/7*100	
							Renja 2024		DPA 2024															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	10	6.652.848.000	4,17	29.638.455.450	6	Rp 46.086.519.500	6	46.086.519.500	2,00	41.372.500	4,00	4.030.097.000					6	4.071.469.500	100,00	8,834404386		
	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	%	80		100		70		70		0,00		0,00						0		0,00			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024		DPA 2024																				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Politik Daerah yang dilaksanakan	%	100	6.652.848.000	100	29.638.455.450	100	Rp 46.086.519.500	100	46.086.519.500	100,00	41.372.500	100,00	4.030.097.000					200	4.071.469.500	200,00	8,834404386

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
						Renja 2024		DPA 2024														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1385	6.652.848.000,00		28.463.386.200	277	Rp46.086.519.500	277	46.086.519.500	100,00	41.372.500	100,00	4.030.097.000					200	4.071.469.500	72,20	8,834404386

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
										I		II		III		IV					
										8		9		10		11					
Renja 2024		DPA 2024																			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)		
	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	kali		3	1.175.069.250																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
						Renja 2024		DPA 2024														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	2.477.993.000	100	1.963.269.250	100	Rp 380.000.000	100	380.000.000	100,00	100	100,00	250.000.000					100	250.000.000	100,00	65,7895
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis Pemanfaatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan	%	100	2.477.993.000	100	1.963.269.250	100	Rp380.000.000	100	380.000.000	100,00	100	100,00	250.000.000					100	250.000.000	100,00	65,7895

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
		Renja 2024		DPA 2024																		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
2	3	4	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	390	2.477.993.000	200	1.278.636.750	120	Rp380.000.000	120	380.000.000	0	120,00	250.000.000					120	250.000.000	100,00	65,78947368
Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		kali			1	684.632.500																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				
											I		II		III		IV								
							8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100								
2		3		4		5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
						Renja 2024		DPA 2024																	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	%	100	710.457.000	100	118.079.350	100	Rp 52.250.000	100	52.250.000	100,00	1.850.000	100,00	0				100	1.850.000	100,00	3,540669856				
	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	%	31		18,7		18		18	0,00		22,22	0				22,222222		123,46						
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	%	100	710.457.000	100	118.079.350	100	Rp52.250.000	100	52.250.000	50,00	1.850.000	100,00	0				100	1.850.000	100,00	3,540669856				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		
										I		II		III		IV						
										8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100						
2	3	4	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
							Renja 2024		DPA 2024													
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	17.457.000	1	1.663.500	1	Rp2.000.000	1	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi P4GN tersusun	Dokumen	4																			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024				DPA 2024																		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	1500	655.000.000	200	63.189.750	100	Rp45.500.000	100	45.500.000	10,00	1.850.000	100,00	0					110	1.850.000	110,00	4,065934066
	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	kali			1	48.704.100																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024		DPA 2024																				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	460	38.000.000	40	4.522.000	100	Rp4.750.000	100	4.750.000	0,00	0						0	0	0,00	0	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100	1.390.000.000	100	2.572.444.999	100	Rp 2.802.000.000	100	2.802.000.000	100,00	59.912.500	100,00	101.624.640				100	161.537.140	100,00	5,765065667	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		
											I		II		III		IV						
											8		9		10		11						12=8+9+10+11
Renja 2024		DPA 2024																					
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp (%)	
	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	85		100			80		80		100,00		100,00						100		125,00	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	%	100	1.390.000.000	100	2.572.444.999	100	Rp 2.802.000.000	100	2.802.000.000	25,00	59.912.500	50,00	101.624.640					75	161.537.140	75,00	5,765065667	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2023		Target Kinerja Renja PD Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	
											I		II		III		IV					
											8		9		10		11					
Renja 2024		DPA 2024																				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)			
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	60	1.390.000.000	12	1.751.358.599	12	Rp2.802.000.000	12	2.802.000.000	3,00	59.912.500	3,00	101.624.640					6	161.537.140	50,00	5,765065667
	Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	kali			12	821.086.400																
	JUMLAH			28.112.578.000		38.023.056.233		Rp 53.447.638.718		Rp 54.646.811.780		Rp 527.611.414		Rp 6.052.610.047		Rp -		Rp -		Rp 6.580.221.361		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional, serta Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat adalah memberikan pembinaan dan layanan fasilitasi bantuan hibah bagi partai politik dan ormas. Selain itu dilaksanakannya pelayanan pendataan dan pencatatan bagi organisasi masyarakat. Sedangkan pada bidang wawasan dan ideologi bangsa dilaksanakannya sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela Negara dengan sasaran kegiatan seluruh elemen masyarakat.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial			85%	80%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan			100%	100%	100%	100%	81,63%	100%	100%	100%	
4	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan			1%	4%	7%	11%	1,04%	4%	7%	11%	
5	Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan			15%	4%	7%	10%	11,67%	4%	10%	11%	
6	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar			6%	12%	18%	25%	5,83%	12,9%	18%	25%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa Terbentuk			34%	67%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	
8	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik			2%	4%	6%	8%	2,00%	2,17%	6%	8%	
9	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol			65%	70%	75%	80%	100%	100%	75%	80%	
10	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

- 1). Beberapa target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam dokumen RPJMD belum tercapai sesuai yang direncanakan. Namun bukan berarti hal ini merupakan ketidakberhasilan BAKESBANGPOL dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pelayanan dasar di bidang Pemerintahan Umum. Bakesbangpol terus berupaya untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian target.
- 2). Beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dan terus mendapat perhatian diantaranya adalah
 - a. Semakin meningkatnya penyebaran beragam ideologi diluar ideologi Pancasila yang berpotensi merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Menurunnya penguatan internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada diri generasi muda yang berpotensi menimbulkan sikap intoleran;
 - c. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Kabupaten Klaten, hal ini terbukti dengan jumlah kasus yang terjadi sebanyak 73 kasus menduduki peringkat 3 tertinggi di Jawa Tengah;
 - d. Banyaknya penduduk asal Kabupaten Klaten yang terpapar faham radikalisme, terorisme dan ekstrimisme, hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah eks narapidana terorisme (napiter) di Kabupaten Klaten menduduki peringkat tertinggi se-Jawa Tengah.
- 3). Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah yang Berdampak Pada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
 - a) Kinerja Bakesbangpol tidak akan tercapai maksimal karena adanya kegiatan yang kemungkinan tidak tercapai 100% sehingga akan mempengaruhi pencapaian visi misi (kepala daerah).
- 4). Tantangan dan Peluang Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perangkat



Daerah

a. Tantangan

- Kerjasama dan dukungan sektor lain masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Bakesbangpol saja.

b. Peluang

- Menguatnya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan kesehatan dari APBN dan APBD.
- Adanya dukungan dari Pemerintah melalui SE Permendagri untuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemerintahan Umum
- Adanya dukungan dari Bakesbangpol Provinsi dalam melaksanakan kegiatan di urusan yang ditangani oleh Bakesbangpol Kabupaten.

5). Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan OPD Tahun Anggaran 2024 adalah Prioritas kegiatan Kesbangpol yang mendukung prioritas daerah tahun 2024 adalah

- a. Pembumih nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat usia sekolah dan masyarakat umum secara masif dan berkesinambungan atau berkelanjutan;
- b. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Melakukan kerjasama dengan semua stakeholder, untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh masyarakat tentang bahaya narkoba dan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- d. Melakukan sosialisasi moderasi beragama dan pluralisme budaya Indonesia kepada masyarakat usia sekolah dan masyarakat umum guna sedini mungkin yaitu melakukan cegah-tangkal paham-paham yang membahayakan eksistensi ideologi Pancasila.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2025 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2024 antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS

2. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila
3. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Penyusunan Pergub, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN Rencana Kerja 2024 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
4. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama
7. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab Klaten	Program dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya politik 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

			<p>4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial, dan budaya</p> <p>5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>
--	--	--	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa tujuan Kabupaten Klaten yaitu Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial serta pendidikan politik masyarakat

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa sasaran Bakesbangpol Kabupaten Klaten adalah

- a. Terkendalinya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama

- b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.

Tabel 3.2. Tujuan sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024	
					Murni	Perubahan
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial serta pendidikan politik masyarakat		Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	Jumlah Konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya tahun n / Konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya tahun n tertangani X 100%	%	100	100
	Terkendalnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama	Persentase potensi Konflik Sosial tertangani	Jumlah Konflik Sosial tertangani tahun n / Jumlah Konflik Sosial tahun n X 100%	%	100	100
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten)	Jumlah pemilih hadir di TPS di bagi daftar pemilih tetap tahun n X 100	%	83	87

BAB IV

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang baik akan menuntun pada hasil-hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran serta visi dan misi.

Kebijaksanaan pembangunan di bidang Kesatuan bangsa dan politik diarahkan untuk menciptakan suasana daerah yang sehat dan dinamis bagi berlangsungnya proses pembangunan bidang lainnya. Untuk itu ditetapkan beberapa program kegiatan. Adapun Rancangan Perubahan rencana kerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada table 4.4. berikut :

Tabel 4.4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					53.447.638.718	55.629.685.138								5.056.826.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					53.447.638.718	55.629.685.138								5.056.826.000
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	3.800.469.218	4.982.515.638								3.138.807.000
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100,00 %	100,00 %	30.000.000	21.140.000								10.000.000
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	21.140.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	1 Dokumen	10.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	3.164.476.179	3.335.782.599								2.873.507.000

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	19 orang/bulan	3.044.476.179	3.226.522.599	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	17 orang/bulan	2.720.507.000
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	109.260.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	1 Dokumen	153.000.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100,00 %	100,00 %	247.000.000	247.000.000								109.796.000
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	2 Paket	3.000.000
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35.000.000	35.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	2 Paket	10.000.000
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.000.000	25.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	2 Paket	15.000.000
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	2.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	4 dokumen	4.573.000
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	40.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	12 Laporan	15.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGLATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	140.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	12 Laporan	62.223.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100,00 %	100,00 %	118.493.039	120.993.039								88.262.000
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.221.800	2.221.800	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	PAJAK ROKOK	PAJAK ROKOK	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	0	1.030.000
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.271.239	42.271.239	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	12 Laporan	25.000.000
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	6.500.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	0	0
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	70.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	12 laporan	62.232.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100,00 %	100,00 %	240.500.000	1.257.600.000								57.242.000
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	148.000.000	172.600.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	11 unit	37.305.000

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5.000.000	0	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	4 unit	2.500.000
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit		2.500.000	0	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pegawai Bakesbangpol		0	2.500.000
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.000.000	1.050.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	2 unit	7.437.000
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	35.000.000	35.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	9 unit	7.500.000
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	7,00 %	10,00 %	326.400.000	526.400.000								55.500.000
		Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	7,00 %	10,00 %										
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan	100,00 %	100,00 %	326.400.000	526.400.000								55.500.000

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK Kab. Klaten, KNPI, Paskibraka dan Purna Paskibraka Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol		5.500.000
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	500 Orang	321.400.000	521.400.000	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK Kab. Klaten, KNPI, Paskibraka dan Purna Paskibraka Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK Kab. Klaten, KNPI, Paskibraka dan Purna Paskibraka, Masyarakat Kabupaten Klaten	150 orang	50.000.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	70,00 %	100,00 %	46.086.519.500	46.086.519.500								1.121.197.000
		Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	6,00 %	8,00 %										

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di daerah yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di daerah yang dilaksanakan	100,00 %	100,00 %	46.086.519.500	46.086.519.500								1.121.197.000

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGLATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	277 orang	277 orang	46.086.519.500	46.086.519.500	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Kab Klaten. Seluruh Kecamatan	PAJAK ROKOK, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PAJAK ROKOK, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Forkompinda Kab. Klaten, Partai Politik (PDIP, PKB, Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar, PPP, PAN), KPU, Bawaslu, Kodim, Polres dan Masyarakat Kab. Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Forkompinda Kab. Klaten, Partai Politik (PDIP, PKB, Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar, PPP, PAN), KPU, Bawaslu, Kodim, Polres dan Masyarakat Kab. Klaten	120 orang	1.121.197.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100,00 %	100,00 %	380.000.000	380.000.000								402.859.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	100,00 %	100,00 %	380.000.000	380.000.000								402.859.000
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 orang	120 orang	380.000.000	380.000.000	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	FKUB dan FKDM, Ormas di Kabupaten Klaten	FKUB dan FKDM, Ormas di Kabupaten Klaten	120 orang	402.859.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	18,00 %	25,00 %	52.250.000	52.250.000								78.463.000
		Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa Terbentuk	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa Terbentuk	100,00 %	100,00 %										

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100,00 %	100,00 %	52.250.000	52.250.000								78.463.000
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayampri	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayampri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten		3.463.000
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100 orang	45.500.000	45.500.000	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	100 orang	65.000.000
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100 orang	4.750.000	4.750.000	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	50 orang	10.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET		PAGU INDIKATIF		LOKASI		SUMBER DANA		KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	TARGET	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	80,00 %	100,00 %	2.802.000.000	3.602.000.000								260.000.000
		Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100,00 %	100,00 %										
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100,00 %	100,00 %	2.802.000.000	3.602.000.000								260.000.000
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		50 orang	0	2.000.000		Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan		PAJAK ROKOK			100 orang	0
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	2.802.000.000	3.600.000.000	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	PAJAK ROKOK	PAJAK ROKOK	Polres dan Anggota Forkompimda Kabupaten Klaten	Polres dan Anggota Forkompimda Kabupaten Klaten	12 Dokumen	260.000.000
JUMLAH						53.447.638.718	55.629.685.138								5.056.826.000

Tabel 4.2 Kertas Kerja Rankhir Perubahan Renja 2024

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024								KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025					
				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		LOKASI		SUMBER DANA				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah				
1	2	3		4		5		6		7		8		9	10				
8																			
8	01							53.447.638.718	55.629.685.138								4.040.376.133		
8	01	01						3.800.469.218	4.982.515.638										
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	100%	30.000.000	30.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit					10.000.000		
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	30.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	1 Dokumen	10.000.000

8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	3.164.476.179	3.346.522.599								3.185.374.700
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	19 orang/bulan	3.044.476.179	3.226.522.599	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	17 orang/bulan	3.045.374.700
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	120.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	1 Dokumen	140.000.000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	247.000.000	247.000.000								273.039.000
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	2 Paket	8.539.000
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35.000.000	35.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	2 Paket	37.500.000
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.000.000	25.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	2 Paket	25.000.000

8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	2.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	4 dokumen	2.000.000
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	40.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	12 Laporan	50.000.000
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	140.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	12 Laporan	150.000.000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	100%	118.493.039	120.993.039								142.000.000
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.221.800	2.221.800	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	PAJAK ROKOK	PAJAK ROKOK	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	0	0
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.271.239	42.271.239	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	12 Laporan	72.000.000

8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	6.500.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	0	0
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	70.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	12 laporan	70.000.000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	240.500.000	1.238.000.000								230.000.000
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	148.000.000	148.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	11 unit	170.000.000
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5.000.000	5.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	4 unit	5.000.000
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	0 Unit	2.500.000	0	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	0	0

8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.000.000	1.050.000.000	Kab. Klaten, Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Selatan, Gayamprit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	2 unit	35.000.000	
8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	35.000.000	35.000.000	Kab. Klaten, Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol	Pegawai Bakesbangpol	9 unit	20.000.000	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	7%	10%	326.400.000	526.400.000								30.000.000	
						Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	7%	10%											
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dilaksanakan	100%	100%	326.400.000	526.400.000	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan							30.000.000

8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK Kab. Klaten, KNPI, Paskibraka dan Purna Paskibraka Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol		
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	500 Orang	321.400.000	521.400.000	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK Kab. Klaten, KNPI, Paskibraka dan Purna Paskibraka Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK Kab. Klaten, KNPI, Paskibraka dan Purna Paskibraka, Masyarakat Kabupaten Klaten	150 orang	30.000.000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	6%	8%	46.086.519.500	46.086.519.500								1.171.767.000
						Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	70%	100%										

8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Politik Daerah yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Politik Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	46.086.519.500	46.086.519.500							1.171.767.000	
8	01	03	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	277 orang	277 orang	46.086.519.500	46.086.519.500	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	PAJAK ROKOK, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	PAJAK ROKOK, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Forkompinda Kab. Klaten, Partai Politik (PDIP, PKB, Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar, PPP, PAN), KPU, Bawaslu, Kodim, Polres dan Masyarakat Kab. Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Forkompinda Kab. Klaten, Partai Politik (PDIP, PKB, Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar, PPP, PAN), KPU, Bawaslu, Kodim, Polres dan Masyarakat Kab. Klaten	120 orang	1.171.767.000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100%	100%	380.000.000	380.000.000								



8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Teknis Pemanjangan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemanjangan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan	100%	100%	380.000.000	380.000.000							230.000.000	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 orang	120 orang	380.000.000	380.000.000	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	FKUB dan FKDM, Ormas di Kabupaten Klate	FKUB dan FKDM, Ormas di Kabupaten Klate	120 orang	230.000.000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	100%	100%	52.250.000	52.250.000								35.000.000
						Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	18%	25%										

8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100%	100%	52.250.000	52.250.000								35.000.000
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten		
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100 orang	45.500.000	45.500.000	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten, Seluruh Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	100 orang	30.000.000

8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	100 orang	4.750.000	4.750.000	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	Pegawai Bakesbangpol, Pelajar SMA/MA/SMK, Mahasiswa, Penghayat Kepercayaan dan FKUB di Kabupaten Klaten	50 orang	5.000.000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	100%	100%	2.802.000.000	3.602.000.000								90.000.000
						Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	80%	100%										
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100%	100%	2.802.000.000	3.602.000.000								90.000.000
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 orang	50 orang	0	2.000.000	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	Kab. Klaten. Seluruh Kecamatan	PAJAK ROKOK	PAJAK ROKOK			100 orang	30.000.000

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2025 yang disusun merupakan pedoman sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024. Sehingga Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian.

Prioritas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menekan konflik sosial dan penanganan konflik sosial. Beberapa kegiatan yang juga dilaksanakan OPD lain seperti kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba maupun kegiatan lain bidang kesatuan bangsa dan politik seperti sosialisasi wawasan kebangsaan yang menjadi tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dilaksanakan koordinasi sehingga tidak overlapping sasaran.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Perubahan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang

dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2024.

Agar pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rancangan Perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Proyeksi rencana belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp **55.629.685.138,-** untuk membiayai 6 program.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2024 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum